

## **Analisis Kebijakan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia** (Ditinjau dari Proses Sekuritisasi dan Lingkungan Hidup)

**ABSTRAK.** Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi (*content analysis*) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup (*environment*) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan (*prosperity approach*) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrastruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara.

**Kata kunci :** pulau-pulau kecil terluar, sekuritisasi, lingkungan hidup, kesejahteraan.

**RINGKASAN**  
**Program Studi Ilmu Lingkungan**  
**Program Pascasarjana Universitas Indonesia**  
**Tesis (Desember, 2008)**

- A. Nama** : **Metrini Geopani**
- B. Judul Tesis** : **Analisis Kebijakan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia**  
(Ditinjau dari Proses Sekuritisasi dan Lingkungan Hidup)
- C. Jumlah Halaman** : halaman permulaan 11; halaman isi 132; Gambar 21, Tabel 8; dan lampiran 2

**D. Isi Ringkasan**

Indonesia secara langsung berbatasan darat dan/atau laut dengan 10 (sepuluh) negara. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Kawasan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan laut dengan Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea dan Timor Leste. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 183 titik dasar (TD) dengan lebih dari 50% TD berada di pulau – pulau kecil terluar (PKT) atau berjumlah 92 pulau kecil (Perpres No.78, 2005). Kawasan PKT Indonesia tersebar di 20 propinsi dengan kisaran luasan antara 0,05 – 200 km<sup>2</sup> dan sekitar 36 pulau yang berpenghuni. Kondisi pulau pada umumnya masih alami berupa pulau batu, karang dan pulau yang tidak memiliki vegetasi dengan sebagian besar tidak berpenghuni. Lahirnya komitmen pemerintah Indonesia untuk mengelola pulau-pulau kecil berdasarkan fakta bahwa Indonesia sebagai negara *kepulauan (archipelagic state)* berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982 memiliki 17.508 pulau. Potensi ancaman pada 12 PKT Indonesia meliputi: (1) ketidakjelasan batas wilayah di laut, (2) penanganan pelintas batas oleh nelayan dan kapal asing, (3) pertumbuhan penduduk, (4) kondisi biogeofisik, (5) keterbatasan sarana dan prasarana, dan (6) ketimpangan perekonomian masyarakat lokal dengan negara tetangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis strategi pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara berdasarkan proses sekuritisasi, (2) Menganalisis strategi pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara berdasarkan pendekatan

lingkungan hidup (*environment*), (3) Menganalisis strategi pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara berdasarkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas 20 dokumen, implementasi kegiatan kelembagaan, jurnal, literatur mengenai pulau-pulau kecil terluar khususnya 12 PKT Indonesia. Variabel-variabel yang diamati adalah ekoregion dan antropogenik (pendekatan bioregion) dan proses sekuritisasi (skema Buzan) pada variabel ancaman kedaulatan negara.

Untuk menjawab tujuan pertama, peneliti menggunakan tabulasi skema Barry Buzan yang menggambarkan proses sekuritisasi pada 12 PKT Indonesia. Tujuan kedua, menggunakan tabulasi indikator kerja aspek ekoregion pada sumberdaya alam 12 PKT Indonesia untuk mengetahui ada tidaknya faktor degradasi lingkungan dan tekanan antropogenik yang mengancam kedaulatan negara. Tujuan ketiga, peneliti menggunakan tabulasi indikator kerja aspek kesejahteraan berdasarkan dokumen, literatur dan implementasi kelembagaan 12 PKT Indonesia, yaitu mengaitkan nasionalisme dan kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengatasi ancaman kedaulatan bagi Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup (*environment*) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami (Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Fanildo, Batek dan Dana) maupun tekanan antropogenik (Pulau Marore, Miangas, Marampit, Bras, dan Fani) pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA.

Strategi pengelolaan kesejahteraan (*prosperity approach*) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk (Pulau Marore, Miangas, Marampit, Bras, dan Fani) terkait dengan jarak, infrastruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara.

#### **E. Daftar Kepustakaan: 117 (dari tahun 1974 sampai tahun 2008)**

(SUMMARY)

**Programme of Study in Environmental Science Postgraduate Programme  
University of Indonesia  
Thesis (December, 2008)**

- A. Name** : **Metrini Geopani**
- B. Title** : **Policy Analysis for Management of the 12 Strategic Outer-most Islands of Indonesia**  
(Environment and Securitization Approaches)
- C. Number of pages** : Initial pages 11; Contents 132; Pictures 16; Tables 8; and appendix 2

**D. Summary**

Indonesia has direct land and/or sea borders with 10 (ten) countries. Indonesia shares land borders with Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. The outer territories of the Republic of Indonesia have sea borders with Australia, Malaysia, Singapore, India, Thailand, Vietnam, the Philippines, Palau, Papua New Guinea and Timor Leste. Peraturan Pemerintah No. 38, Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan reports that Indonesia has 183 based points, of which 92 (or more than 50%) of these based points are located in the strategic outer-most islands (Perpres No.78, 2005). The territories of Indonesia's outer-most islands are distributed through out 20 (twenty) provinces. Each of these areas has a range of 0.05-200 km<sup>2</sup> and only about 36 of the islands are inhabitant. Generally, these outer-most islands are still in their natural state, for example stone, rocks and little or no vegetation. Most are not inhabited. The Indonesian government has a commitment to manage the outer-most islands. This commitment was recognized by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982, which declared Indonesia to be an archipelago state with 17.508 islands, which includes the islands discussed in this report. The potential threats to the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia result from: (1) unclear sea borders, (2) problems related to foreign ships and fishermen, (3) demography, (4) biogeophysical conditions, (5) limited infrastructures, and (6) economic gaps between the local people and bordering countries.

The goals of this research are to: (1) To analyze Indonesia's management of the 12 (twelve) strategic outer-most islands regarding threats to sovereignty and securitization; (2) to analyze the management of the 12 (twelve) strategic outer-most islands regarding threats to sovereignty based on an environmental approach, (3) to analyze the management of the 12 (twelve) strategic outer-most islands regarding threats to sovereignty based on an economic-developmental in prosperity approach.

The methodology in this research is the qualitative approach with the content analysis of some official documents and literature, action plans, journals, and

other published materials related to the 12 strategic outer-most islands of Indonesia. Observed variables were ecoregion and antroporegion (bioregion approach) and securitization (Buzan, et al) to the sovereignty threats variable.

For the first goal, the researcher used tabulations on the Barry Buzan scheme, which describe securitization on the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia. The second goal involved tabulations of ecoregion indicators for natural resources of the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia to find out whether there were anthropogenic burdens or environmental degradation which effect sovereignty. For the third, the researcher used tabulations on anthrop region indicators related to the prosperity approach based on official documents, literature and action plans related to the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia. These tabulations linked the quality of life and nationalism to the ability to acquire basic human needs as they relate to threats against Indonesia sovereignty.

The results of this research show that the securitization process on the 12 (twelve) strategic outer-most islands, where there are threats against Indonesia sovereignty, has only been implemented on the politisation level. The outer-most islands' issues were only considered important enough to be discussed technically among the departments, especially in Nipa Island and Miangas Island. Ten of the twelve outer-most islands of Indonesia on the other side are experiencing de-securitization because the management policy for the 12 (twelve) strategic outer-most islands is more focused on prosperity and environment approaches.

The strategy of environment management on the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia, which has been implemented by Indonesia government, cannot totally prevent threats to Indonesia sovereignty. Environmental degradation, which happens naturally, and anthropogenic burdens on the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia cannot be reversed by natural processes alone.

The strategy of the prosperity approach on the 12 (twelve) strategic outer-most islands of Indonesia, which has been implemented by Indonesia government, can only partially prevent threats to Indonesian sovereignty. The effects of this strategy are limited to the five inhabited strategic outer-most islands and these are influenced by distance, infrastructure, and economic gaps with bordering countries. This approach influences the quality of life on these islands and how the local people obtain their basic needs. This impacts the national loyalties of the people indigenous to these islands. The conclusion is that a successful strategy for the management of the 12 outer-most islands of Indonesia needs three coordinated approaches in order to sustain sovereignty. The securitization, environment and prosperity approaches are all necessary.

## **E. The Bibliography: 117 (from 1974 to 2008)**